

Pelanggaran Substansial Amerika Serikat terhadap Perjanjian Markas Besar PBB dan Argumen untuk Pemindahan Permanen ke Jenewa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ada untuk menyediakan forum universal di mana negara-negara berdaulat berdiskusi sebagai setara. Prinsip universalitas ini hanya dapat dijalankan jika semua negara anggota dapat mengakses markas besar organisasi tanpa diskriminasi politik.

Perjanjian Markas Besar 1947 antara PBB dan Amerika Serikat mengkodifikasi prinsip ini. Amerika Serikat, sebagai negara tuan rumah, berjanji untuk tidak menghalangi perjalanan perwakilan negara anggota ke dan dari markas besar PBB. Namun, peristiwa baru-baru ini – terutama **penolakan visa untuk delegasi Palestina** pada September 2025 dan **pencabutan visa Presiden Kolombia Gustavo Petro** beberapa hari kemudian – menunjukkan bahwa Amerika Serikat gagal memenuhi kewajibannya. Ini bukanlah kesalahan terisolasi, melainkan bagian dari pola politik yang menargetkan kritisus kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Perilaku tersebut merupakan *pelanggaran substansial* terhadap Perjanjian Markas Besar. Menurut hukum internasional, pelanggaran substansial memberi hak kepada pihak lain – dalam hal ini PBB – untuk menangguhkan atau mengakhiri kewajibannya. Majelis Umum, dengan menjalankan otoritasnya berdasarkan **Pasal 20 Piagam PBB**, harus merespons dengan memindahkan sesi-sesinya secara permanen ke Jenewa.

Argumen Hukum: Pelanggaran Substansial terhadap Perjanjian Markas Besar

Pasal 13 Perjanjian Markas Besar mewajibkan Amerika Serikat untuk memastikan akses tanpa hambatan bagi perwakilan negara anggota yang menghadiri pertemuan PBB. Kewajiban ini bersifat mutlak: tidak bergantung pada konten politik dari pidato seorang delegasi atau hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan negara delegasi tersebut.

Bukti Pelanggaran pada Tahun 2025

- **Penolakan Visa untuk Delegasi Palestina:** Amerika Serikat menolak visa untuk pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang mencegah partisipasi langsung di Majelis Umum. Abbas berpidato di Majelis Umum secara daring pada 25 September 2025.

- **Pencabutan Visa Presiden Gustavo Petro:** Pada 27 September, Amerika Serikat mencabut visa Petro tak lama setelah ia bergabung dengan unjuk rasa pro-Palestina di New York dan mengkritik kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel.
- **Pola yang Lebih Luas:** Tindakan ini sesuai dengan tren yang lebih luas dari kesediaan Amerika Serikat untuk menghalangi delegasi yang dianggap tidak nyaman secara politik.

Preseden 1988 jelas: ketika Amerika Serikat menolak visa untuk Yasser Arafat, Majelis Umum memilih untuk mengadakan sesinya di Jenewa. Ini menunjukkan baik kapasitas Amerika Serikat untuk melanggar kewajibannya maupun otoritas Majelis untuk bertindak.

Pelanggaran Substansial Menurut Hukum Internasional

Pasal 60 **Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969)** mendefinisikan pelanggaran substansial sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang penting untuk mencapai tujuan perjanjian. Tujuan utama dari Perjanjian Markas Besar adalah untuk menjamin akses universal. Penolakan dan pencabutan visa yang berulang secara langsung melemahkan tujuan ini.

PBB, sebagai pihak yang tidak melanggar, berhak untuk menganggap perjanjian tersebut tidak berlaku.

Otoritas Majelis Umum untuk Memindahkan

Pasal 20 Piagam PBB menetapkan bahwa Majelis Umum akan bertemu “pada waktu dan tempat yang ditentukannya sendiri.” Otoritas ini independen dari Dewan Keamanan; tidak ada veto atas lokasi pertemuan.

Dengan demikian, Majelis Umum dapat mengadopsi resolusi yang:

1. Menyatakan Amerika Serikat melakukan pelanggaran substansial terhadap Perjanjian Markas Besar;
2. Menegaskan kembali otoritasnya untuk menentukan tempat pertemuannya;
3. Memindahkan sesi-sesinya ke Jenewa.

Jika Amerika Serikat keberatan, sengketa tersebut menjadi wewenang **Mahkamah Internasional (ICJ)**. Pasal 21 Perjanjian Markas Besar sudah mengatur arbitrase dan, jika gagal, yurisdiksi ICJ. Majelis Umum juga dapat meminta **pendapat konsultatif** berdasarkan Pasal 96 Piagam.

Kelayakan Praktis Pemindahan ke Jenewa

Jenewa sudah menjadi tuan rumah **Kantor PBB di Jenewa (UNOG), WHO, ILO, UNHCR**, dan banyak badan lainnya. Palais des Nations menjadi tuan rumah Majelis Umum pada tahun 1988 dan telah menunjukkan skalabilitas melalui konferensi besar, terakhir UNCTAD16 pada tahun 2025.

Misi Diplomatik

Hampir semua negara anggota sudah memiliki misi permanen di Jenewa. Pemindahan akan memerlukan ekspansi, tetapi biaya akan diimbangi oleh penghematan dari penutupan atau pengurangan kantor di New York, di mana biaya real estat dan hidup jauh lebih tinggi.

Kerangka Negara Tuan Rumah

Swiss memiliki kerangka hukum yang sudah lama ada untuk operasi PBB. Perjanjian negara tuan rumah yang diperluas dapat dinegosiasikan dengan lancar, mengingat peran Jenewa yang sudah ada sebagai pusat PBB.

Biaya bagi Amerika Serikat

- **Pekerjaan:** Sekretariat PBB mempekerjakan **7.500–8.000 staf di New York**, banyak di antaranya adalah warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Kepergian mereka akan langsung mengurangi lapangan kerja lokal.
- **Kontraktor:** Perusahaan katering, kebersihan, transportasi, dan layanan konferensi akan kehilangan kontrak yang signifikan.

Kerugian Terkait Misi Diplomatik

- **Misi Permanen:** Penutupan atau pengurangan ~190 misi diplomatik di New York akan mengurangi permintaan akan kantor, apartemen, dan layanan pendukung. Ribuan karyawan lokal akan terdampak.

Pariwisata dan Perhotelan

- **Pekan Majelis Umum:** Arus masuk tahunan ribuan diplomat, media, dan LSM menyuntikkan jutaan dolar ke sektor perhotelan dan pariwisata New York.
- **Kontribusi Keseluruhan:** Studi memperkirakan komunitas PBB menghasilkan **3,69 miliar dolar per tahun** untuk ekonomi New York, mendukung sekitar **16.000 pekerjaan**. Selama satu dekade, kerugian kumulatif akan mendekati **40 miliar dolar**.

Biaya Simbolis dan Strategis

- **Kehilangan Kekuatan Lembut:** Menjadi tuan rumah PBB memberi Washington akses harian ke pemimpin dunia. Pemindahan akan menghilangkan keuntungan diplomatik unik ini.
- **Kekalahan Geopolitik:** Langkah ini akan dilihat sebagai bukti bahwa Amerika Serikat tidak dapat dipercaya sebagai tuan rumah netral, melemahkan klaimnya untuk memimpin tatanan internasional berbasis aturan.

Antisipasi Argumen Balasan Amerika Serikat

- **Hak Berdaulat untuk Mengontrol Perbatasan:** Amerika Serikat mungkin berargumen bahwa keputusan visa adalah tindakan berdaulat. Namun, dengan menandatangi Perjanjian Markas Besar, Amerika Serikat secara tegas membatasi kedaulatannya dalam konteks ini.
- **Justifikasi Keamanan:** Amerika Serikat dapat menyebutkan terorisme atau ketertiban umum. Tetapi penolakan sistematis terhadap kritis, bukan risiko keamanan, mengungkapkan niat politik.
- **Pengaruh Anggaran:** Washington mungkin mengancam untuk menahan kontribusi 22% terhadap anggaran PBB. Namun, ancaman semacam itu hanya akan memperkuat persepsi itikad buruk dan dapat mempercepat diversifikasi pendanaan PBB.

Peta Jalan untuk Majelis Umum

1. **Mengadopsi Resolusi** yang mengutuk praktik visa Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Markas Besar dan menegaskan kembali otoritas Majelis Umum untuk menentukan tempat pertemuannya.
2. **Meminta Pendapat Konsultatif dari ICJ** untuk memperkuat dasar hukum pemindahan.
3. **Bernegosiasi dengan Swiss** untuk memperluas perjanjian negara tuan rumah untuk sesi Majelis Umum permanen.
4. **Pemindahan Bertahap** dimulai dengan sesi Majelis Umum 2026 di Jenewa, kemudian diperluas ke fungsi markas besar lainnya sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Penghalangan berulang Amerika Serikat terhadap delegasi melalui penolakan dan pencabutan visa yang bermotivasi politik adalah *pelanggaran substansial* terhadap Perjanjian Markas Besar. Majelis Umum tidak wajib mentoleransi ini. Majelis memiliki otoritas hukum dan sarana praktis untuk memindahkan sesi-sesinya ke Jenewa.

Pemindahan semacam itu akan menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar dan kekalahan reputasi yang signifikan bagi Amerika Serikat, sambil menegaskan kembali kemerdekaan dan universalitas PBB. Jika Amerika Serikat menentang keputusan ini, mereka dapat membawa sengketa tersebut ke ICJ.

Saatnya telah tiba bagi PBB untuk bertindak tegas. Untuk menjaga integritas, universalitas, dan kredibilitasnya, Majelis Umum harus memindahkan diri secara permanen ke Jenewa.